

# Bab 1

---

## PENDAHULUAN

Oleh:

*Samsul Bakri, Christine Wulandari, Slamet Budi Yuwono, Hari Kaskoyo, Indra Gumay  
Febryano dan Rahmat Safe'i*

Pembangunan berkesinambungan telah menjadi topik sentral bagi setiap negara di seluruh belahan dunia manapun sejak kesepakatan dapat dicapai dalam KTT Bumi yang pertama kali diselenggarakan di Rio de Janeiro tahun 1992. Sebagai subsistem dari sistem pembangunan nasional setiap negara, maka pembangunan sektor kehutanan sejak dua dasawarsa terakhir juga mengambil aras kiblat keberkesinambungan (SFM: *Sustainable Forest Manajemen*) termasuk di Indonesia. Secara generik makna yang terkandung di situ adalah pembangunan untuk memanfaatkan sumber daya hutan (SDH) untuk mencukupi kebutuhan generasi sekarang tanpa **mengorbankan** kepentingan generasi yang akan datang. Pesan moral dari SFM ini menjadi subyek perdebatan yang meruncing menyangkut mulai dari tataran yang bersifat filosofis dalam perancangan pengembangan kebijakan sampai ke tataran praktis di level tapak yang melibatkan individu pelaku sebagai aktor pembangunan.

Perdebatan seperti itu wajar berkembang bukan hanya di kalangan ilmuwan, melainkan juga kalangan para *policy makers*, birokrat, pelaku bisnis, maupun penggiat lingkungan. Bahkan perdebatan itu sering sampai meruncing, tetapi pada berbagai aspek juga mengerucut kepada satu pandangan bersama. Mengingat konsep kebersinambungan itu menyangkut dimensi waktu yang tidak dapat balik (*irreversible*) sifatnya, maka dialek-

tika dan perdebatan (*discourses*) tersebut penting untuk terus difalitisasi dan dilanjutkan agar dapat dicapai pemahaman bersama yang hakiki tentang makna dan implikasi dari SFM itu sendiri. Termasuk untuk memperoleh indikator-indikator kebersinambungan yang kukuh (*robust*) sifatnya dalam melakukan perencanaan sampai evaluasi terhadap suatu praktek SFM mulai dari level nasional sampai di level tapak. Dengan begitu diharapkan dapat dihindarkan berbagai bentuk kesalahan yang berujung pada kegagalan yang dampaknya harus ditanggung oleh generasi yang akan datang. Dengan kata lain bahwa dalam aras SFM *moral hazard avoidance* haruslah menjadi perilaku bagi setiap individu generasi sekarang, baik mulai dari aktor di level perumus kebijakan, birokrat tingkat atas, birokrat tingkat lapangan sampai pada individu dalam setiap komunitas. Untuk tujuan berkontribusi pada pengembangan *discourses* semacam inilah antara lain kami tulis berbagai pemikiran dalam buku ini.

Subjek pokok dalam buku ini adalah sumberdaya alam khususnya sumberdaya hutan (SDH), yang secara generik dapat dimaknai sebagai suatu ekosistem yang telah berperan peran bagi perkembangan setiap peradaban dari setiap bangsa. Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang dapat berkembang tanpa SDA ini, baik itu SDH yang ada di wilayahnya sendiri seperti Indonesia ataupun yang memanfaatkan imbasan (*positive externality*) dari negara sebelahnyanya seperti Singapura atau pun negara-negara industri maju lainnya. Baik dimulai dari negara yang terbelakang sampai menjadi negara industri maju, aktivitas setiap individu di setiap wilayah suatu negara senantiasa selalu bergantung pada ekosistem hutan, baik secara langsung atau pun tidak. Aktivitas individu tersebut yang pertama kali tidak lain adalah mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika seorang individu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maka disebut sebagai individu yang sejahtera (*better off*).

Menurut Osoianu (2016) ilmu yang mengkhususkan diri untuk mempelajari perilaku individu dalam mencari nafkah disebut sebagai Ilmu Ekonomi (*Economics*). Berasal dari kata Bahasa Yunani *Oikos* (lingkungan tempat tinggal) + *Nomos* (mencari nafkah), yang pada tataran yang paling kontemporer adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengakumulasi kapital menjadi aset-aset kepemilikan atau portofolio kekayaan diridengan cara mengekstrak dan mengembangkannya dari

lingkungan sekitarnya. Menurut kedua pakar ini pulalah tidak ada satu individu makhluk hidup pun yang dapat berdiri sendiri dan terlepas dari lingkungan sekitarnya, melainkan senantiasa berinteraksi membentuk suatu sistem kesetimbangan dinamik (*steady state of equilibrium*). Fenomena hubungan tersebut secara generik dikenal sebagai ekosistem, yang berasal dari kata Bahasa Yunani juga *Oikos* (lingkungan tempat tinggal) + *system* (yaitu kumpulan entitas individu yang saling berinteraksi sehingga bila ada satu komponen berubah maka akan menggeser arah interaksi keseluruhan). Artinya bagi Osoianu(2016) meyakini bahwa dewasa ini hanya di bumi lah yang dapat ditemukan sebagai tempat untuk berevolusi dan berkembangnya suatu ekosistem. Karena itu kedua pakar ini memandang Ekologi (ilmu ekosistem) sebagaimata uang yang bersisian dengan Ilmu Ekonomi, yang berarti pula bahwa tidak ada ekosistem tidak ada kegiatan perekonomian untuk melakukan akumulasi kapital.

Dalam pandangan Maslow (lihat Gerrow, 1992) kebutuhan setiap individu manusia itu berjenjang atau berhirarki. Dengan urutan yang klimaks hirarkhi itu berturut-turut meliputi: (i) kebutuhan dasar (*psychological needs* seperti makan; minum; seksual; tempat tinggal dll), (ii) kebutuhan rasa aman dan nyaman (*safety need*); (iii) kebutuhan untuk dicintai (*love and belonging need*); (iv) kebutuhan untuk dihargai (*esteem need*); dan (v) kebutuhan kebergunaan bagi orang lain (*self actualization*) seperti menjadi tokoh politik, peraih Hadiah Nobel dan sebagainya. Kebutuhan dasar sebagai hirarkhi pertama dalam spektrum kesejahteraanala Maslow ini sifatnya relatif tidak beragam antarindividu. Sedangkan hirarkhi di atasnya cukup beragam bahkan bisa sangat beragam. Kecuali itu, pemenuhan kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan itu juga berjenjang. Bila kebutuhan dasar sudah dipenuhi (terpenuhinya kesejahteraan level pertama) maka secara umum akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan hirarkhi ke dua dan seterusnya. Berbeda dengan kebutuhan pada dunia hewani, karakter pemenuhan kebutuhan bagi setiap individu manusia itu pada umumnya tidak dapat dibatasi. Artinya sekalipun sudah mencapai level kesejahtraan tertentu perilaku melakukan ekstraksi ekosistem oleh manusia terus berlangsung. Dengan kata lain aspirasi manusia untuk mengaktualisasikan dirinya terus berkembang tanpa pernah dapat dibatasi. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak dapat dibatasi inilahmaka

setiap pembangunanberkesinambungan haruslah menjadi paradigmanya, termasuk dalam praksis pembangunan kehutanan yang diartikulasikan dalam manajemen SDH yang berkesinambungan (SFM).

Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tersebut maka akan selalu bermuara padaaktivitas individu manusiasebagai aktor yang *selfish* yang senantiasa terdorong untuk mengejar *pleasure* dan menghindari resiko atau *risk averse* (Atkinson, 1997). Dalam keadaan ini individu cenderung untuk melakukan ekstraksi terhadap setiap manfaat dari SDA dan mengabaikan dampak negatifakibat ekstrasi tersebut yang wujud akumulasi akhirnya berupa kerusakan sumberdaya alamdan lingkungan.Artinya dalam setiap ekstraksi manfaat SDA (yang akan selalu mengeser kesetimbangan ekosistem tersebut) banyak atau bahkan umumnya setiap individu dalam masyarakat akan berperilaku *selfish*.Dengan kata lainakan selalu terjebak dalam perilaku untuk mengutamakan penumpukankapital tanpa memperdulikan dampak kerusakan ekosistem.

Mengingat kumuliasi individu secara agregatitu tidak lain adalah masyarakat, jika demikian, maka ketidakadilan sosial ekonomi akan menggejala: masyarakat penumpuk kapital (*baca: kapitalis*) akan mengambil sebagian besar manfaat dari setiap ekstraksi SDH dengan mengabaikan kerusakan lingkungan. Masyarakat setempat yang harus memikul kerusakan lingkungan dan akan semakin eksploitatif terhadap SDH demi hanya untuk mempertahankan kehidupan level subsistennya. Fenomekonflik manusia dengan satwa liar, ledakan hama dan penyakit tanaman, ledakan penyakit pada manusia dan ternak, banjir di musim hujan, kekeringan di musim kemarau, kelongsoran tanah, erosi yang akut, sedimentasi (pada waduk, sungai, danau dan badan-badan air lainnya) merupakan fenomena kerusakan ekosistem yang mungkin terus akan semakin eskalatif ke depan, bahkan mungkin harus diwariskan kepada generasi mendatang. Gejala ketidakberkesinambungan praktek pengelolaan sumberdaya hutan ini masih sangat kentara di banyak kawasan di Indonesia. Gejala ini adalah bukti bahwa SFM yang telah kita terapkanmenjadi subjek keraguan apakah telah benar-benar manjadi kesatuan pemahaman oleh para *stake holder* pengelolaan hutan. Patut kita pertanyakan kinerja adopsi SFM mulai dari tataran filosofis sampai ke tataran praktek manajemen di level tapak.

Untuk tujuan mengasah dan mempertajam dialektika pemikiran kritis menuju pencarian semacam konsensus kesepahaman bersama mengenai SFM itu, maka kami memandang perlu memberikan kontribusi pemikiran ke dalam 6 topik dalam buku ini. *Pertama* adalah tentang pilihan ideologi lingkungan yang difokuskan pada *discourses analysis* mengenai pentingnya untuk memilih ideologi yang tepat bagi pengembangan ketiga jenis fungsi hutan: hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi bahkan pada hutan hak. Topik ini terutama ditujukan kepada para *forest planner* yang dalam melayani *client*-nya (yaitu *policy makers*) senantiasa dihadapkan pada pilihan antara pemanfaatan hutan untuk tujuan penghela kesejahteraan generasi sekarang secara cepat ataukah pada pilihan untuk mengikuti kapasitas sangga (*buffering*) ekologis sehingga kesehatan SDH tetap terjamin (*resilient*) terhadap berbagai guncangan ekosistem sebagai dampak dari praktek pengelolaan itu sendiri.

Dalam topik ini diulas tentang dua ideologi lingkungan utama yaitu (*T*)*technocentric* dan (*E*)*ecocentric* yang saling antagonis. Ideologi pertama bertolak dari keyakinan (*belief*) yang memandang bahwa dengan kemampuan teknokratik yang dikuasai sampai saat ini kaum penganut ideologi *Technocentric* ini meyakini bahwa SDH dapat berkesinambungan jika dipandang pada sisi nilai instrumennya, perlu dieksploitasi secara maksimal untuk peningkatan kesejahteraan manusia tanpa perlu ada kekhawatiran akan kerusakan ekosistemnya. Penganut ideologi ini terbagi ke dalam dua bagian *T\_conservative* yang ekstrim kiri dan *T\_accomodating* yang masih mempertimbangkan penting konservasi. Keyakinan yang berlawanan adalah ideologi *Ecocentric* yang memandang bahwa SDH seharusnya dihargai karena nilai intrinsiknya. Kelompok ini juga terbagi dalam dua kelompok yaitu *E\_deep ecologist* dan *E\_communist*.

Bagi kaum ekstrim kanan *E\_deep ecologist* pemanfaatan SDH beserta isinya haruslah minimal, bahkan unsur abiotiknya pun perlu diproteksi. Walaupun kaum ini mulai berkembang signifikan jumlahnya di negara-negara Eropa Barat, tetapi sub ideologi ini hampir tidak mungkin diadopsi oleh para *forest planner* dalam merancang SFM di negara-negara berkembang yang masih memerlukan pertumbuhan ekonomi yang berimplikasi pada kebutuhan untuk pemanfaatan SDH yang cukup intensif. Muncul kemudian sub ideologi *E\_communist* yang agak longgar dari pada *E\_deep ecologist*

walaupun masih lebih ketat dibandingkan *T\_accomodating*. Pesan utama dari topik ini agar *paraforest planner* bertindak profesional dalam menerapkan pilihan ideologi dalam merancang SFM, tidak terkooptasi kepada keinginan *client* sekalipun dihadapkan pada tekanan.

Untuk membangun ketajaman intuisi para pengelola hutan dalam perancangan SFM, maka pada topik *ke dua* kami hadirkan bahan diskusi yang difokuskan pada SDH sebagai penghela kesejahteraan. Terutama di negara-negara tropika basah yang sebagian besar masyarakatnya masih mengandalkan pada ekstraksi sumberdaya alam, pemenuhan kebutuhan dasar menjadi *limiting factor* bagi pemenuhan kesejahteraan pada yang lebih atas. Bahkan faktor ini terus bekerja pada setiap level kesejahteraan seperti yang dipostulatkan secara umum oleh Maslow (Garrow, 1992) tersebut di atas. Adanya surplus ekonomi (*baca: nilai lebih dari pendapatan setelah dikurangi pengeluaran*) bagi penduduk miskin akan menjadi *breakthrough* untuk menapaki ke level kesejahteraan berikutnya. Apalagi yang menyandarkan hidupnya dari wilayah suboptimal seperti kawasan hutan, yang jauh dari layanan publik termasuk layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan investasi ataupun layanan administratif kependudukan dan sebagainya.

Berbagai aset yang dimiliki yang terdiri dari aset sosial, aset manusia, aset alam, aset fisik dan aset keuangan harus dikelola dengan baik agar dapat mencapai penghidupan (*livelihood*) yang lestari. *Livelihood* akan menjadi berkelanjutan (*sustainable livelihood*) jika dapat menangani kemiskinan dan memelihara atau meningkatkan kemajuan-kemajuan serta meningkatkan aset-aset untuk masa depan generasi yang akan datang tanpa merusak sumberdaya yang menjadi tumpuannya. Dapat pula diartikan merupakan suatu syarat bagi berkembangnya kelompok masyarakat yang telah mencapai level kesejahteraan yang lebih tinggi. Begitu seterusnya seperti yang digambarkan oleh Maslow (Garrow, 1992). Artinya bila suatu pengelolaan SDH mampu memberikan kinerja *sustainable livelihood* seperti itu maka dapat menjadi salah satu indikasi bagi tercapainya harapan suatu SFM yang sejatinya. Kerangka kerja *sustainable livelihood* dari DFID (DFID 2009) yang dimodifikasi dapat digunakan untuk menganalisis pengelolaan hutan yang salah satunya adalah kegiatan pemanfaatan hutan.

Untuk memberikan pijakan bagi berlangsungnya suatu aktivitas pemanfaatan SDH yang menjamin peningkatan kesejahteraan secara berkesinambungan (*sustainable livelihood*) seperti itu, maka diperlukan suatu perencanaan sampai pada level tapak pengelolaan yang berasaskan pada suatu sistem biofisik yang menjadi tempat berlangsung dan berkembangnya berbagai ekosistem, dengan ekosistem hutan sebagai bagian yang esensialnya. Kebutuhan ini tidak bisa dielakkan mengingat setiap SDH tidak ada yang tidak berpijak pada suatu sistem lahan. Sistem biofisik yang dimaksud di sini tidak lain adalah sistem hidrologi daratan yang dikenal sebagai sistem daerah aliran sungai (DAS). Pentingnya suatu perencanaan berasaskan DAS karena dalam sistem ini terus berlangsung siklus hidrologi sepanjang masa yang tunduk pada hukum gravitasi. Air sebagai unsur kehidupan disuplai oleh proses presipitasi, sebagian diuapkan secara langsung, sebagian mengalir di permukaan tanah, sebagian meresap ke dalam tanah (merupakan bagian air presipitasi yang terpenting bagi kehidupan), diserap oleh perakaran untuk fotosintesis dan evapotranspirasi dan sebagian mengalir secara perlahan mengikuti kemiringan lapisan bumi yang dimanfaatkan untuk segala proses kehidupan bagi berbagai ekosistem yang berkembang di elevasi bagian bawah.

Bagian air yang terakhir ini yang bertanggung jawab pada *life support sistem* bagi kehidupan di elevasi bagian tengah ataupun di bagian bawah atau hilir untuk menekan banjir, memelihara kesuburan tanah, mencegah erosi, sedimentasi dalam badan-badan perairan, untuk tenaga listrik, irigasi dan berbagai kebutuhan di zona ekologis manusia. Bersamaan dengan keragaman elevasi dalam suatu sistem DAS, maka distribusi air dari hulu sampai ke muara merupakan prasyarat bagi berkembangnya berbagai ekosistem. Keberagaman berbagai jenis ekosistem di suatu hamparan tersebut juga merupakan salah satu indikator kuat bagi keberlanjutan. Oleh karena itu pada topik *ke Tiga* dalam buku ini kami ajukan bahan diskusi tentang pentingnya pemahaman sistem DAS bagi pengelolaan SDH agar dapat mencapai keberkesinambungan. Pemanfaatan SDH akan menjamin terwujudnya SFM jika perencanaannya didasarkan pada sistem DAS yang bersangkutan.

Perencanaan pengembangan pemanfaatan sumberdaya menggunakan asas sistem DAS ini dapat digolongkan sebagai perencanaan rasional, yang

merupakan jenis perencanaan yang paling ideal dibandingkan dengan berbagai rezim perencanaan lainnya seperti *incremental planning*, *adaptive planning*, *participatory planning* dsb. Namun dalam konteks pengelolaan SDH, bagus atautkah buruknya suatu sistem perencanaan hanya dapat di-*judge* melalui respon hasilnya atau kinerjanya dalam jangka waktu tertentu pelaksanaannya, melalui suatu sistem evaluasi yang komprehensif dan menyeluruh dengan menggunakan indikator yang kongkret dengan metode yang tidak rumit melainkan harus relatif sederhana dalam pengerjaannya. Untuk memberi tantangan lebih lanjut kepada para pembaca dalam proses *inquiring* suatu metode evaluasi seperti itu, pada bagian *ke Empat* ini kami sajikan topik tentang *Konsep Kesehatan Hutan*, yang merupakan suatu hibrid yang relatif baru dari cabang manajemen SDH.

Mengingat masih relatif baru, maka kosep Kesehatan Hutan masih merupakan ladang yang belum banyak diolah untuk dijadikan *tool* dalam evaluasi terhadap suatu praktek manajemen hutan. Secara ringkas dapat diungkapkan bahwa kesehatan ekosistem hutan adalah kelenturan (*resiliency*) suatu ekosistem hutan terhadap adanya guncangan ekologis (*ecological shocks*) baik yang disebabkan oleh faktor alami (seperti agin, gempa bumi, *pest disease* dll) maupun oleh faktor antropogenik (seperti pembabatan hutan, *accelerated erosion*, kelongsoran, banjir dll) seperti tersebut di atas. Dalam konteks ini ekosistem hutan yang sehat adalah hutan yang masih tetap mampu memberikan manfaat ekonomi maupun manfaat ekologis tanpa mengakibatkan merosotnya fungsi hutan secara nyata sebagai *suplier* barang dan jasa ketika mengalami gencangan ekologis sampai terjadi *self recovery* menuju kesetimbangan ekosistem yang mantap kembali. Jika manfaat ekonomi dan manfaat ekologis tetap dapat dipenuhi, maka dengan sendirinya manfaat sosial SDH juga demikian. Argumentasi ini sesuai dengan pemikiran Osoiano (2016) tersebut di atas bahwa ekonomi dan ekologi adalah sisi mata uang yang sama. Konsep dan audit kesehatan hutan ini haruslah menjadi prasyarat terpenting dalam mengembangkan SFM yang sejatinya.

Bila demikian postulat yang harus ditegakkan dalam konsep kesehatan hutan, maka dewasa ini di Indonesia umumnya dan di Provinsi Lampung khususnya, tidak banyak dijumpai ekosistem hutan yang sehat. Dengan kata lain banyak sekali suatupraktek pengelolaan hutan yang mempunyai



indikator keberlanjutan yang sangat lemah. Seperti telah diungkap di atas, adanya fenomena gagal panen akibat serangan hama penyakit pada tanaman budi daya, banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau, erosi yang jauh melampaui ambang dan sedimentasi (pada waduk; bendungan; muara-muara sungai dan badan-badan air lainnya), kebakaran hutan, eskalasi konflik manusia dengan satwa liar serta merebaknya berbagai penyakit baru pada manusia dan ternak adalah sederetan fenomena yang menggambarkan makin merosotnya kesehatan ekosistem hutan kita.

Kemerosotan tersebut sangat ekskalatif dalam dua dasawarsa terakhir yaitu sejak desentralisasi tata pemerintah berlangsung (Bakri, 2012). Tidak bijaksana kita terburu-buru menyalahkan kesepakatan politik nasional tentang desentralisasi itu. Karena fenomena kemerosotan tersebut merupakan andil dari banyak pihak. Sebagaimana diungkapkan oleh Atkinson (1997) tersebut di atas bahwa karakter individu manusia umumnya *selfish* dan *myopic*, tidak mampu menerawang ke dimensi waktu yang jauh kedepan. Dengan begitu maka banyak para *policy maker* yang mengambil jalan pintas untuk segera memperoleh manfaat ekonomi SDH secara cepat tanpa menyadari bahwa kapasitas teknokratik dan Ipteks yang dikuasai kini belum cukup memadai untuk melakukan substitusi teknologi terhadap degradasi komponen ekosistem sebagai dampak perilaku eksploitatif tersebut. Ambisi seperti itu juga dipercepat oleh mental para *forest planner* yang kurang profesional, hanya menjadi pembenar bagi para *client*-nya yaitu para *policy maker*.

Keadaan ini makin akut yang melahirkan suatu fenomena tragedi barang publik (*the tragedy of the common*) seperti diungkapkan Hardin (1968) maupun Crowe (2003). Fenomena ini terjadi pada esensinya juga karena lemahnya berbagai institusi yang ada di dalam masyarakat. Apalagi dengan institusi pasar, yang karakteristiknya sangat begitu otonom, yang sangat dikendalikan oleh segelintir orang (*baca: kapitalis*) sehingga sering terjadi *market buyers* yang bermuara pada perilaku eksploitatif masyarakat marjinal terhadap ekosistem hutan sampai ke kawasan-kawasan konservasi yang ketat. Bahkan kerusakan lingkungan telah dipolitisir (*politicking*) oleh untuk kepentingan beberapa aktor melalui berbagai propaganda sampai ke tingkat global. Untuk memfasilitasi para pembaca dalam mengurai kekusutan berbagai persoalan tentang *moral hazard*, *market hegemonic*, eksploitasi sumberdaya, degradasi ekosistem, serta peran aktor-aktornya

maka pada bagian *ke Lima* ini kami sajikan ke bahan diskusi tentang *Ekologi Politik*.

Diharapkan setelah mencermati topik ini akan muncul semacam stimulasi pada diri para pembaca untuk memberikan kontribusi pemikiran tentang bagaimana strategi untuk memperjuangkan keadilan sosial ekonomi dalam pengelolaan ekosistem hutan yang menjadi kristal yang esensial dalam perjuangan ekologi politik. Lebih lanjut diharapkan juga dapat muncul berbagai stimuli pemikiran tentang bagaimana merancang berbagai strategi pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam meraih keadilan sosial tersebut melalui gerakan masa yang masif. Karena itu pada puncaknya kami sajikan topik *ke Enam* yaitu tentang Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Konservasi untuk merancang SFM.

Dengan mengambil ceruk pembahasan tentang kawasan hutan konservasi diharapkan para pembaca buku dapat memperoleh stimulasi pemikiran tentang strategi untuk memperjuangkan keadilan sosial mulai dari masyarakat yang paling marginal, yang terpaksa harus terdesak ke kawasan yang suboptimal seperti di wilayah penyangga taman nasional, taman hutan raya, atau pun hutan lindung. Masyarakat yang banyak menggantungkan kehidupannya di kawasan-kawasan paling fragil dari sisi resiko akan lenyap plasma nutfah ini sudah selayaknya untuk diposisikan paling atas urgensinya dalam upaya mencari perumusan strategi untuk memperjuangkan keadilan sosial ekonomi mereka. Setelah itu, pemberdayaan masyarakat adalah tahapan urgensi berikutnya agar kemudian sadar akan hak-haknya dan secara sukarela berpartisipasi merasakan pentingnya mempertahankan kelestarian ekosistem tempat mereka melangsungkan perikehidupannya. Keberhasilan dalam menggerakkan partisipasi secara masif masyarakat di zona penyangga dari kawasan konservasi yang ketat seperti ini dapat dijadikan model bagi kawasan hutan lindung secara relative lebih mudah apalagi pada kawasan-kawasan hutan produksi. Namun bila belum berhasil maka ancaman akan lenyapnya ekosistem hutan beserta *non use values* atau pun *bequest values* yang terkandung di dalamnya akan terus membayangi kita. Dengan kata lain, bahwa praktek SFM ke depan akan terus dibayangi resiko yang besar tentang kiamat Malthus maupun lenyapnya ekosistem di bumi seperti yang dipostulatkan sebagai *Gaia Hypothesis* oleh kaum *Deep Ecologists* (lihat Kerry *et. al.*, 1994).

Dengan demikian setelah merampungkan semua topik yang disajikan dalam buku ini maka diharapkan para pembaca akan terprovokasi untuk berkontribusi dalam membangun arsitektur pemikiran tentang konsep SFM yang paling ideal. Selanjutnya untuk turut berkontribusi dalam merancang pelaksanaan SFM di Indonesia atau pun di belahan dunia manapun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atkinson, R. L. 1997. *Introduction to Psychology*. Terjemahan. Ed.8<sup>th</sup>. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Bakri, S. 2012. Fungsi intrinsik hutan dan faktor endogenik pertumbuhan ekonomi sebagai determinan pembangunan wilayah Provinsi Lampung. *Disertasi*. SPS. IPB Bogor.
- DFID. 1999. Sustainable livelihoods guidance sheets. Department for International Development, London.
- Crowe, B. L. 2003. The tragedy of the commons. *Science* 166:1103-1107.
- Gerrow, G. 1992. *Psychology: An Introduction*. John Wiley & Sons. New York.
- Hardin, G. 1968. The tragedy of the commons. *Science* 162:1243-1248.
- Kerry, T., D. Pearce, dan E. Rubinfeld. 1994. *Economics of Natural Resource*. Simon & Shuster. Int. Group.
- Osoiano, D. 2016. It's all about economics –*The urban ecology in T.S. Eliot's the waste land*. *Ovidius University Annals, Economic Sciences Series, Vol. 16* (1):218-222.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id

[www.lppm.unila.ac.id](http://www.lppm.unila.ac.id)

SURAT KETERANGAN JENIS BUKU

Nomor : 2143/UN26.21/PN/2023  
Lampiran : 1 (Satu) Buku

Berdasarkan hasil review atas karya:

Nama : Christine Wulandari, Indra Gumay Febryano, Rahmat Safe'i, Samsul Bakri, Slamet Budi Yuwono

ISBN : 978-602-6912-37-4

Penerbit : Plantaxia

Tahun Terbit : 2016

Unit Kerja : Fakultas Pertanian

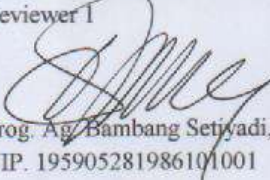
Dengan ini kami sampaikan hasil review dalam tabel berikut:

No	Judul	Keterangan				
		Referensi	Monograf	Buku Penelitian lain: termasuk Book Chapter	Buku Ajar	Buku Lain
1	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan : Provokasi Pemikiran Arsitektur, Konsep, dan Strategi			a. Buku Hasil Penelitian b. Book Chapter		

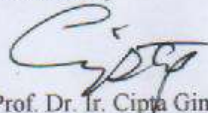
Demikian kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 11 April 2023

Reviewer 1

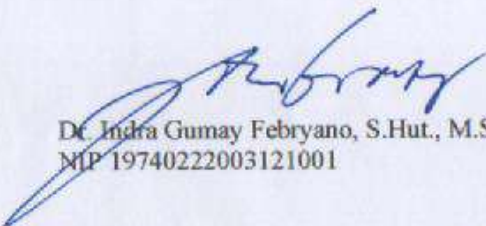


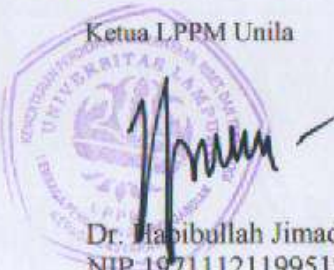
  
Prog. Ag. Bambang Setiyadi, Ph.D.  
NIP. 195905281986101001

Reviewer 2,

  
Prof. Dr. Ir. Cipta Ginting, M.Sc.  
NIP. 196012011984031003

Menyetujui,  
Ketua LPPM,

  
Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si.  
NIP. 197112119951210001

UNIVERSITAS LAMPUNG	
NO. INVEN	12-4-2023
JENIS	30/B/B/IN/FP/2023
Bookchapter	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
Judul Buku	: <b>Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Provokasi Pemikiran Arsitektur, Konsep, dan Strategi</b>
Penulis	: Christine Wulandari, Indra Gumay Febryano, Rahmat Safe'i, <b>Samsul Bakri</b> , Slamet Budi Yuwono
Jurusan	: Kehutanan
Fakultas	: Pertanian
ISBN	: 978-602-6912-37-4
Jumlah Halaman	: 127
Cetakan ke	: Satu (Pertama)
Penerbit/Tempat Tahun	: Plantaxia/Jogjakarta : 2016
Mengetahui:	
Ketua Jurusan Kehutanan	Bandar Lampung, 29 Maret 2023 Penulis Anggota
	
Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si. NIP 19740222003121001	Dr. Ir. Samsul Bakri, 2022 NIP 196105051987032001
Menyetujui:	
Wakil Dekan	Ketua LPPM Unila
	
Prof. Dr. Ir. Barnomo, M.S. NIP 196406131987031002	Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si. NIP 197111211995121001

 plantaxia

# Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

PROVOKASI ARSITEKTUR, PEMIKIRAN, KONSEP DAN STRATEGI



**Christine Wulandari - Hari Kaskoyo - Indra Gumay Febryano  
Rahmat Safe'i - Samsul Bakri - Slamet Budi Yuwono**

# **Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**

**PROVOKASI ARSITEKTUR, PEMIKIRAN, KONSEP DAN STRATEGI**

# **Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**

**PROVOKASI ARSITEKTUR, PEMIKIRAN, KONSEP DAN STRATEGI**

**Christine Wulandari - Hari Kaskoyo - Indra Gumay Febryano  
Rahmat Safe'i - Samsul Bakri - Slamet Budi Yuwono**

 **plantaxia**



**Pengelolaan Hutan Berkelanjutan; Provokasi Arsitektur Pemikiran, Konsep dan Strategi**

*oleh Christine Wulandari; Hari Kaskoyo; Indra Gumay Febryano; Rahmat Safe'i; Samsul Bakri; Slamet Budi Yuwono*

*Editors: Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuw, M.Si; Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc; Ir. Warsono, Ph.D*

Hak Cipta © 2016 pada penulis



Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283

Telp: 0274-889398; 0274-882262; Fax: 0274-889057;

E-mail: [info@plantaxia.com](mailto:info@plantaxia.com); Web: [www.plantaxia.com](http://www.plantaxia.com)

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Tajuk Entri Utama: Judul

Pengelolaan Hutan Berkelanjutan; Provokasi Arsitektur Pemikiran, Konsep dan Strategi/Wulandari, Christine

- Edisi Pertama. Cet. Ke-1. - Yogyakarta: Plantaxia, 2016  
xvi + 118 hlm.; 25 cm

Bibliografi.: 11; 27; 49-53; 66-67; 77-80; 92-93; 112-117

ISBN : 978-602-6912-37-4

E-ISBN : 978-602-6912-38-1

1. Ekologi - Ekologi Hutan

I. Kaskoyo, Hari

II. Febryano, Indra Gumay

III. Safe'i, Rahmat

IV. Bakri, Samsul

V. Yuwono, Slamet Budi

VI. Judul

577.3

Semua informasi tentang buku ini, silahkan scan QR Code di cover belakang buku ini

---

# KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr.wb.*

Pembangunan sektor kehutanan di Indonesia telah memasuki babak baru sejak berlangsungnya reformasi dan desentralisasi tata pemerintahan, terutama sejak diberlakukannya Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti menjadi Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sekalipun sudah berlangsung hampir dua dasawarsa, namun episode perubahan tatanan kelembagaan nasional tersebut dirasa belum bisa sepenuhnya mengendalikan tata kelola pembangunan kehutanan yang berkesinambungan sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan itu sendiri. Bahkan untuk beberapa wilayah telah menampakkan gejala kemerosotan kualitas lingkungan hidup termasuk kualitas maupun fungsi hutan. Kondisi ini nampak setidaknya ketika periode ulang musim ekstrim berlangsung. Salah satunya adalah ketika La Ninna muncul maka terjadi kenaikan permukaan air sehingga akibatkan banjir, longsor, erosi, sedimentasi juga akibatkan adanya pendangkalan danau, waduk, maupun bendungan. Sebaliknya ketika El Ninno, dalam waktu singkat terjadi kekeringan, penyusutan badan-badan air, pasokan PLTA, kahat air bersih di kawasan urban, bahkan kebakaran hutan terjadi pada berbagai wilayah di tanah air tercinta.

Berbagai fenomena yang berdampak negatif terhadap aspek sosial, ekonomi dan ekologi itu telah menggugah para peneliti dan para praktisi di

sektor kehutanan untuk memikirkan peneguhan kembali pengejawatahan konsep dan reorientasi strategi pembangunan sumberdaya hutan dalam bingkai otonomi daerah yang tetap selaras dengan kesepakatan di KTT Bumi yang pertama di Rio de Janeiro 1992. Berkaitan dengan maksud ini saya selaku akademisi atau pun selaku Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menyambut gembira upaya sejawat akademisi kehutanan khususnya yang bernaung di Universitas Lampung (Unila), yaitu Dr. Christine Wulandari dkk. dalam menyumbangkan buah fikirannya berupa konsep-konsep pengelolaan hutan berkelanjutan yang ditinjau dari berbagai aspek dan telah tersusun dalam 7 bab buku ini. Lebih jauh saya berharap disusul oleh sejawat lainnya baik dari kalangan akademisi, praktisi ataupun dari stake holder kehutanan lainnya. Dengan maraknya buah fikiran semacam yang tertuang dalam buku ini maka upaya-upaya berbagai pihak yang merupakan stakeholder sektor kehutanan akan menjadi pilar penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi hutan sekaligus menyejahterakan rakyat dan dapat diwujudkan dalam waktu yang relatif singkat. Akhir kata semoga buku ini banyak membawa manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

*Wassalamualaikum wr. wb.,*

Jakarta 29 September 2016

Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.

---

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR FOTO	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 PILIHAN IDEOLOGI LINGKUNGAN DALAM PRAKSIS MANAJEMEN SUBERDAYA HUTAN BERKESINAMBUNGAN	13
2.1 Pendahuluan	13
2.2 Pemahaman terhadap Konsep Ideologi Lingkungan	14
2.3 Klasifikasi Ideologi Lingkungan dalam Pemanfaatan SDA	14
2.4 Ideologi Lingkungan sebagai Landasan Kebijakan Publik dalam SMF	19
2.5 Simpulan dan Rekomendasi	26
Daftar Pustaka	27
BAB 3 PENERAPAN SUSTAINABLE LIVELIHOOD FRAMEWORK DALAM MENGANALISIS PENGELOLAAN HUTAN	29
3.1 Pendahuluan	29
3.2 Pengelolaan Hutan di Indonesia	31
3.3 Pengertian <i>Livelihood</i> dan <i>Sustainable Livelihood</i>	34

3.4	<i>Sustainable Livelihood Framework</i>	36
3.5	Aset-aset Penghidupan	37
3.6	Konteks kerentanan	40
3.7	Perubahan, struktur dan proses	40
3.8	Strategi-strategi/kegiatan-kegiatan <i>livelihood</i> dan hasil	41
3.9	<i>Sustainable livelihood framework</i> dalam pengelolaan hutan di Indonesia	42
3.10	Kesimpulan dan rekomendasi	48
	Daftar Pustaka	49
<b>BAB 4</b>	<b>PERTIMBANGAN ASPEK HIDROLOGI, LAHAN DAN IKLIM DALAM PENGELOLAAN DAS (ZONASI AGRO EKOLOGI DALAM PENGGUNAAN LAHAN)</b>	<b>55</b>
4.1	Pendahuluan	55
4.2	Kebijakan Pengelolaan DAS yang Berkaitan dengan Penggunaan Lahan	58
4.3	Pertimbangan Teknis Penggunaan Lahan yang Rasional dalam Pengelolaan DAS	62
4.4	Penutup	66
	Daftar Pustaka	66
<b>BAB 5</b>	<b>KESEHATAN HUTAN: PENTINGNYA KESEHATAN EKOSISTEM HUTAN DALAM MEWUJUDKAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI</b>	<b>69</b>
5.1	Pendahuluan	69
5.2	Konsep Kesehatan Ekosistem Hutan	71
5.3	Penyebab Masih Kurang Seriusnya Perhatian Terhadap Kondisi Kesehatan Ekosistem Hutan	73
5.4	Pemantauan dan Penilaian Kesehatan Ekosistem Hutan	74
5.5	Simpulan Dan Rekomendasi	77
	Daftar Pustaka	77
<b>BAB 6</b>	<b>EKOLOGI POLITIK PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM</b>	<b>81</b>
6.1	Pendahuluan	81
6.2	Definisi Ekologi Politik	82

6.3	Dimensi Politisasi Lingkungan	85
6.4	Pendekatan dalam Ekologi Politik	86
6.5	Relasi Kekuasaan antar Aktor	89
6.6.	Penutup	92
	Daftar Pustaka	92
<b>BAB 7</b>	<b>PENTINGNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI</b>	<b>95</b>
7.1	Pendahuluan	95
7.2	Mengapa Perlu Ada Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi	97
7.3	Beberapa Kebijakan Yang Relevan Dengan Peran Serta Masyarakat Di Kawasan Konservasi	101
7.5	Manfaat Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi	103
7.6	Contoh Di Lapangan Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman, Bandar Lampung	103
7.7	Kesimpulan Dan Rekomendasi	111
	Daftar Pustaka	112
	Daftar Peraturan Perundangan	116



---

# DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3.1</b>	Sustainable Livelihood Framework (Kerangka kerja Penghidupan yang berkelanjutan) oleh DFID.	37
<b>Gambar 3.2</b>	Kerangka kerja Penghidupan yang berkelanjutan untuk menganalisis pengelolaan hutan lindung (modifikasi dari Kaskoyo, H, 2015).	43
<b>Gambar 7.1</b>	Peta situasi Tahura WAR terhadap daerah sekitar	107





---

## DAFTAR FOTO

- Foto 3.1** Tanaman Kopi yang Dibudidayakan Secara Agroforestry di Zona Budidaya di Hutan Lindung Pada Program Hutan Kemasyarakatan 44
- Foto 3.2** Tanaman Campuran di Zona Budidaya Pada Program Hutan Kemasyarakatan di Hutan Lindung. 45
- Foto 3.3** Satwa Liar, Siamang, yang Berada di Zona Perlindungan di Hutan Lindung Pada Program Hutan Kemasyarakatan. 46
- Foto 3.4** Sungai Kecil yang Sumber Mata Airnya Berasal Dari Zona Perlindungan, Digunakan Untuk Sumber Tenaga Mikrohidro. 46
- Foto 3.5** Zona Perlindungan yang Dibuka Oleh Masyarakat Untuk Budidaya Tanaman Pada Salah Satu Lokasi Program Hutan Kemasyarakatan di Hutan Lindung. 47
- Foto 3.6** Getah Karet Dan Foto 3.7. Biji Kopi Sebagai Hasil Utama Pendapatan Masyarakat Pada Salah Satu Program Hutan Kemasyarakatan di Hutan Lindung. 47
- Foto 7.1** Pelantikan Kelompok Sadar Wisata Gunung Betung Oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandarlampung (Foto Oleh Christine Wulandari, 2015) 105
- Foto 7.2** Pembangunan 3 Buah Gazebo di Lokasi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Gunung Betung (Foto Oleh Christine Wulandari, 2016) 106

- Foto 7.3** Pembangunan Pondok Pertemuan di Lokasi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Gunung Betung (Foto Oleh Christine Wulandari, 2016) 108
- Foto 7.4** Pertemuan Pokdarwis dengan Tim Universitas Lampung dan Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandarlampung Beserta Jajarannya Membahas Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Gunung Betung (Foto Oleh Christine Wulandari, 2016) 109

-oo0oo-

---

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	Pilihan Ideologi Lingkungan dalam Pemanfaatan SDA yang telah Berkembang di Kalangan Kaum Teknokratik dan Para Penentu Kebijakan di Berbagai Belahan Dunia	17
<b>Tabel 4.1</b>	Alternatif Pemecahan Masalah dengan Pendekatan Ekosistem DAS.	64
<b>Tabel 6.1</b>	Tesis Ekologi Politik	84
<b>Tabel 6.2</b>	Dimensi Politisasi Lingkungan	85
<b>Tabel 6.3</b>	Konsep dan Proses dalam Ekologi Politik	88



# Bab 1

---

## PENDAHULUAN

Oleh:

*Samsul Bakri, Christine Wulandari, Slamet Budi Yuwono, Hari Kaskoyo, Indra Gumay  
Febryano dan Rahmat Safe'i*

Pembangunan berkesinambungan telah menjadi topik sentral bagi setiap negara di seluruh belahan dunia manapun sejak kesepakatan dapat dicapai dalam KTT Bumi yang pertama kali diselenggarakan di Rio de Janeiro tahun 1992. Sebagai subsistem dari sistem pembangunan nasional setiap negara, maka pembangunan sektor kehutanan sejak dua dasawarsa terakhir juga mengambil aras kiblat keberkesinambungan (SFM: *Sustainable Forest Manajemen*) termasuk di Indonesia. Secara generik makna yang terkandung di situ adalah pembangunan untuk memanfaatkan sumber daya hutan (SDH) untuk mencukupi kebutuhan generasi sekarang tanpa **mengorbankan** kepentingan generasi yang akan datang. Pesan moral dari SFM ini menjadi subyek perdebatan yang meruncing menyangkut mulai dari tataran yang bersifat filosofis dalam perancangan pengembangan kebijakan sampai ke tataran praktis di level tapak yang melibatkan individu pelaku sebagai aktor pembangunan.

Perdebatan seperti itu wajar berkembang bukan hanya di kalangan ilmuwan, melainkan juga kalangan para *policy makers*, birokrat, pelaku bisnis, maupun penggiat lingkungan. Bahkan perdebatan itu sering sampai meruncing, tetapi pada berbagai aspek juga mengerucut kepada satu pandangan bersama. Mengingat konsep kebersinambungan itu menyangkut dimensi waktu yang tidak dapat balik (*irreversible*) sifatnya, maka dialek-

tika dan perdebatan (*discourses*) tersebut penting untuk terus difalitisasi dan dilanjutkan agar dapat dicapai pemahaman bersama yang hakiki tentang makna dan implikasi dari SFM itu sendiri. Termasuk untuk memperoleh indikator-indikator kebersinambungan yang kukuh (*robust*) sifatnya dalam melakukan perencanaan sampai evaluasi terhadap suatu praktek SFM mulai dari level nasional sampai di level tapak. Dengan begitu diharapkan dapat dihindarkan berbagai bentuk kesalahan yang berujung pada kegagalan yang dampaknya harus ditanggung oleh generasi yang akan datang. Dengan kata lain bahwa dalam aras SFM *moral hazard avoidance* haruslah menjadi perilaku bagi setiap individu generasi sekarang, baik mulai dari aktor di level perumus kebijakan, birokrat tingkat atas, birokrat tingkat lapangan sampai pada individu dalam setiap komunitas. Untuk tujuan berkontribusi pada pengembangan *discourses* semacam inilah antara lain kami tulis berbagai pemikiran dalam buku ini.

Subjek pokok dalam buku ini adalah sumberdaya alam khususnya sumberdaya hutan (SDH), yang secara generik dapat dimaknai sebagai suatu ekosistem yang telah berperan peran bagi perkembangan setiap peradaban dari setiap bangsa. Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang dapat berkembang tanpa SDA ini, baik itu SDH yang ada di wilayahnya sendiri seperti Indonesia ataupun yang memanfaatkan imbasan (*positive externality*) dari negara sebelahnyanya seperti Singapura atau pun negara-negara industri maju lainnya. Baik dimulai dari negara yang terbelakang sampai menjadi negara industri maju, aktivitas setiap individu di setiap wilayah suatu negara senantiasa selalu bergantung pada ekosistem hutan, baik secara langsung atau pun tidak. Aktivitas individu tersebut yang pertama kali tidak lain adalah mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika seorang individu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maka disebut sebagai individu yang sejahtera (*better off*).

Menurut Osoianu (2016) ilmu yang mengkhususkan diri untuk mempelajari perilaku individu dalam mencari nafkah disebut sebagai Ilmu Ekonomi (*Economics*). Berasal dari kata Bahasa Yunani *Oikos* (lingkungan tempat tinggal) + *Nomos* (mencari nafkah), yang pada tataran yang paling kontemporer adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengakumulasi kapital menjadi aset-aset kepemilikan atau portofolio kekayaan diridengan cara mengekstrak dan mengembangkannya dari

lingkungan sekitarnya. Menurut kedua pakar ini pulalah tidak ada satu individu makhluk hidup pun yang dapat berdiri sendiri dan terlepas dari lingkungan sekitarnya, melainkan senantiasa berinteraksi membentuk suatu sistem kesetimbangan dinamik (*steady state of equilibrium*). Fenomena hubungan tersebut secara generik dikenal sebagai ekosistem, yang berasal dari kata Bahasa Yunani juga *Oikos* (lingkungan tempat tinggal) + *system* (yaitu kumpulan entitas individu yang saling berinteraksi sehingga bila ada satu komponen berubah maka akan menggeser arah interaksi keseluruhan). Artinya bagi Osoianu(2016) meyakini bahwa dewasa ini hanya di bumi lah yang dapat ditemukan sebagai tempat untuk berevolusi dan berkembangnya suatu ekosistem. Karena itu kedua pakar ini memandang Ekologi (ilmu ekosistem) sebagaimata uang yang bersisian dengan Ilmu Ekonomi, yang berarti pula bahwa tidak ada ekosistem tidak ada kegiatan perekonomian untuk melakukan akumulasi kapital.

Dalam pandangan Maslow (lihat Gerrow, 1992) kebutuhan setiap individu manusia itu berjenjang atau berhirarki. Dengan urutan yang klimaks hirarkhi itu berturut-turut meliputi: (i) kebutuhan dasar (*psychological needs* seperti makan; minum; seksual; tempat tinggal dll), (ii) kebutuhan rasa aman dan nyaman (*safety need*); (iii) kebutuhan untuk dicintai (*love and belonging need*); (iv) kebutuhan untuk dihargai (*esteem need*); dan (v) kebutuhan kebergunaan bagi orang lain (*self actualization*) seperti menjadi tokoh politik, peraih Hadiah Nobel dan sebagainya. Kebutuhan dasar sebagai hirarkhi pertama dalam spektrum kesejahteraanala Maslow ini sifatnya relatif tidak beragam antarindividu. Sedangkan hirarkhi di atasnya cukup beragam bahkan bisa sangat beragam. Kecuali itu, pemenuhan kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan itu juga berjenjang. Bila kebutuhan dasar sudah dipenuhi (terpenuhinya kesejahteraan level pertama) maka secara umum akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan hirarkhi ke dua dan seterusnya. Berbeda dengan kebutuhan pada dunia hewani, karakter pemenuhan kebutuhan bagi setiap individu manusia itu pada umumnya tidak dapat dibatasi. Artinya sekalipun sudah mencapai level kesejahtraan tertentu perilaku melakukan ekstraksi ekosistem oleh manusia terus berlangsung. Dengan kata lain aspirasi manusia untuk mengaktualisasikan dirinya terus berkembang tanpa pernah dapat dibatasi. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak dapat dibatasi inilahmaka



setiap pembangunanberkesinambungan haruslah menjadi paradigmanya, termasuk dalam praksis pembangunan kehutanan yang diartikulasikan dalam manajemen SDH yang berkesinambungan (SFM).

Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tersebut maka akan selalu bermuara padaaktivitas individu manusiasebagai aktor yang *selfish* yang senantiasa terdorong untuk mengejar *pleasure* dan menghindari resiko atau *risk averse* (Atkinson, 1997). Dalam keadaan ini individu cenderung untuk melakukan ekstraksi terhadap setiap manfaat dari SDA dan mengabaikan dampak negatifakibat ekstrasi tersebut yang wujud akumulasi akhirnya berupa kerusakan sumberdaya alamdan lingkungan.Artinya dalam setiap ekstraksi manfaat SDA (yang akan selalu mengeser kesetimbangan ekosistem tersebut) banyak atau bahkan umumnya setiap individu dalam masyarakat akan berperilaku *selfish*.Dengan kata lainakan selalu terjebak dalam perilaku untuk mengutamakan penumpukankapital tanpa memperdulikan dampak kerusakan ekosistem.

Mengingat kumuliasi individu secara agregatitu tidak lain adalah masyarakat, jika demikian, maka ketidakadilan sosial ekonomi akan menggejala: masyarakat penumpuk kapital (*baca: kapitalis*) akan mengambil sebagian besar manfaat dari setiap ekstraksi SDH dengan mengabaikan kerusakan lingkungan. Masyarakat setempat yang harus memikul kerusakan lingkungan dan akan semakin eksploitatif terhadap SDH demi hanya untuk mempertahankan kehidupan level subsistennya. Fenomekonflik manusia dengan satwa liar, ledakan hama dan penyakit tanaman, ledakan penyakit pada manusia dan ternak, banjir di musim hujan, kekeringan di musim kemarau, kelongsoran tanah, erosi yang akut, sedimentasi (pada waduk, sungai, danau dan badan-badan air lainnya) merupakan fenomena kerusakan ekosistem yang mungkin terus akan semakin eskalatif ke depan, bahkan mungkin harus diwariskan kepada generasi mendatang. Gejala ketidakberkesinambungan praktek pengelolaan sumberdaya hutan ini masih sangat kentara di banyak kawasan di Indonesia. Gejala ini adalah bukti bahwa SFM yang telah kita terapkanmenjadi subjek keraguan apakah telah benar-benar manjadi kesatuan pemahaman oleh para *stake holder* pengelolaan hutan. Patut kita pertanyakan kinerja adopsi SFM mulai dari tataran filosofis sampai ke tataran praktek manajemen di level tapak.

Untuk tujuan mengasah dan mempertajam dialektika pemikiran kritis menuju pencarian semacam konsensus kesepahaman bersama mengenai SFM itu, maka kami memandang perlu memberikan kontribusi pemikiran ke dalam 6 topik dalam buku ini. *Pertama* adalah tentang pilihan ideologi lingkungan yang difokuskan pada *discourses analysis* mengenai pentingnya untuk memilih ideologi yang tepat bagi pengembangan ketiga jenis fungsi hutan: hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi bahkan pada hutan hak. Topik ini terutama ditujukan kepada para *forest planner* yang dalam melayani *client*-nya (yaitu *policy makers*) senantiasa dihadapkan pada pilihan antara pemanfaatan hutan untuk tujuan penghela kesejahteraan generasi sekarang secara cepat ataukah pada pilihan untuk mengikuti kapasitas sangga (*buffering*) ekologis sehingga kesehatan SDH tetap terjamin (*resilient*) terhadap berbagai guncangan ekosistem sebagai dampak dari praktek pengelolaan itu sendiri.

Dalam topik ini diulas tentang dua ideologi lingkungan utama yaitu (*T*)*technocentric* dan (*E*)*ecocentric* yang saling antagonis. Ideologi pertama bertolak dari keyakinan (*belief*) yang memandang bahwa dengan kemampuan teknokratik yang dikuasai sampai saat ini kaum penganut ideologi *Technocentric* ini meyakini bahwa SDH dapat berkesinambungan jika dipandang pada sisi nilai instrumennya, perlu dieksploitasi secara maksimal untuk peningkatan kesejahteraan manusia tanpa perlu ada kekhawatiran akan kerusakan ekosistemnya. Penganut ideologi ini terbagi ke dalam dua bagian *T\_conservative* yang ekstrim kiri dan *T\_accomodating* yang masih mempertimbangkan penting konservasi. Keyakinan yang berlawanan adalah ideologi *Ecocentric* yang memandang bahwa SDH seharusnya dihargai karena nilai intrinsiknya. Kelompok ini juga terbagi dalam dua kelompok yaitu *E\_deep ecologist* dan *E\_communist*.

Bagi kaum ekstrim kanan *E\_deep ecologist* pemanfaatan SDH beserta isinya haruslah minimal, bahkan unsur abiotiknya pun perlu diproteksi. Walaupun kaum ini mulai berkembang signifikan jumlahnya di negara-negara Eropa Barat, tetapi sub ideologi ini hampir tidak mungkin diadopsi oleh para *forest planner* dalam merancang SFM di negara-negara berkembang yang masih memerlukan pertumbuhan ekonomi yang berimplikasi pada kebutuhan untuk pemanfaatan SDH yang cukup intensif. Muncul kemudian sub ideologi *E\_communist* yang agak longgar dari pada *E\_deep ecologist*

walaupun masih lebih ketat dibandingkan *T\_accomodating*. Pesan utama dari topik ini agar *paraforest planner* bertindak profesional dalam menerapkan pilihan ideologi dalam merancang SFM, tidak terkooptasi kepada keinginan *client* sekalipun dihadapkan pada tekanan.

Untuk membangun ketajaman intuisi para pengelola hutan dalam perancangan SFM, maka pada topik *ke dua* kami hadirkan bahan diskusi yang difokuskan pada SDH sebagai penghela kesejahteraan. Terutama di negara-negara tropika basah yang sebagian besar masyarakatnya masih mengandalkan pada ekstraksi sumberdaya alam, pemenuhan kebutuhan dasar menjadi *limiting factor* bagi pemenuhan kesejahteraan pada yang lebih atas. Bahkan faktor ini terus bekerja pada setiap level kesejahteraan seperti yang dipostulatkan secara umum oleh Maslow (Gerrow, 1992) tersebut di atas. Adanya surplus ekonomi (*baca*: nilai lebih dari pendapatan setelah dikurangi pengeluaran) bagi parapenduduk miskin akan menjadi *breakthrough* untuk menapaki ke level kesejahteraan berikutnya. Apalagi yang menyandarkan hidupnya dari wilayah suboptimal seperti kawasan hutan, yang jauh dari layanan publik termasuk layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan investasi ataupun layanan administratif kependudukan dan sebagainya.

Berbagai aset yang dimiliki yang terdiri dari aset sosial, aset manusia, aset alam, aset fisik dan aset keuangan harus dikelola dengan baik agar dapat mencapai penghidupan (*livelihood*) yang lestari. *Livelihood* akan menjadi berkelanjutan (*sustainable livelihood*) jika dapat menangani kemiskinan dan memelihara atau meningkatkan kemajuan-kemajuan serta meningkatkan aset-aset untuk masa depan generasi yang akan datang tanpa merusak sumberdaya yang menjadi tumpuannya. Dapat pula diartikan merupakan suatu syarat bagi berkembangnya kelompok masyarakat yang telah mencapai level kesejahteraan yang lebih tinggi. Begitu seterusnya seperti yang digambarkan oleh Maslow (Gerrow, 1992). Artinya bila suatu pengelolaan SDH mampu memberikan kinerja *sustainable livelihood* seperti itu maka dapat menjadi salah satu indikasi bagi tercapainya harapan suatu SFM yang sejatinya. Kerangka kerja *sustainable livelihood* dari DFID (DFID 2009) yang dimodifikasi dapat digunakan untuk menganalisis pengelolaan hutan yang salah satunya adalah kegiatan pemanfaatan hutan.

Untuk memberikan pijakan bagi berlangsungnya suatu aktivitas pemanfaatan SDH yang menjamin peningkatan kesejahteraan secara berkesinambungan (*sustainable livelihood*) seperti itu, maka diperlukan suatu perencanaan sampai pada level tapak pengelolaan yang berasaskan pada suatu sistem biofisik yang menjadi tempat berlangsung dan berkembangnya berbagai ekosistem, dengan ekosistem hutan sebagai bagian yang esensialnya. Kebutuhan ini tidak bisa dielakkan mengingat setiap SDH tidak ada yang tidak berpijak pada suatu sistem lahan. Sistem biofisik yang dimaksud di sini tidak lain adalah sistem hidrologi daratan yang dikenal sebagai sistem daerah aliran sungai (DAS). Pentingnya suatu perencanaan berasaskan DAS karena dalam sistem ini terus berlangsung siklus hidrologi sepanjang masa yang tunduk pada hukum gravitasi. Air sebagai unsur kehidupan disuplai oleh proses presipitasi, sebagian diuapkan secara langsung, sebagian mengalir di permukaan tanah, sebagian meresap kedalam tanah (merupakan bagian air presipitasi yang terpenting bagi kehidupan), diserap oleh perakaran untuk fotosintesis dan evapotranspirasi dan sebagian mengalir secara perlahan mengikuti kemiringan lapisan bumi yang dimanfaatkan untuk segala proses kehidupan bagi berbagai ekosistem yang berkembang di elevasi bagian bawah.

Bagian air yang terakhir ini yang bertanggung jawab pada *life support sistem* bagi kehidupan di elevasi bagian tengah ataupun di bagian bawah atau hilir untuk menekan banjir, memelihara kesuburan tanah, mencegah erosi, sedimentasi dalam badan-badan perairan, untuk tenaga listrik, irigasi dan berbagai kebutuhan di zona ekologis manusia. Bersamaan dengan keragaman elevasi dalam suatu sistem DAS, maka distribusi air dari hulu sampai ke muara merupakan prasyarat bagi berkembangnya berbagai ekosistem. Keberagaman berbagai jenis ekosistem di suatu hamparan tersebut juga merupakan salah satu indikator kuat bagi keberlanjutan. Oleh karena itu pada topik *ke Tiga* dalam buku ini kami ajukan bahan diskusi tentang pentingnya pemahaman sistem DAS bagi pengelolaan SDH agar dapat mencapai keberkesinambungan. Pemanfaatan SDH akan menjamin terwujudnya SFM jika perencanaannya didasarkan pada sistem DAS yang bersangkutan.

Perencanaan pengembangan pemanfaatan sumberdaya menggunakan asas sistem DAS ini dapat digolongkan sebagai perencanaan rasional, yang

merupakan jenis perencanaan yang paling ideal dibandingkan dengan berbagai rezim perencanaan lainnya seperti *incremental planning*, *adaptive planning*, *participatory planning* dsb. Namun dalam konteks pengelolaan SDH, bagus atautkah buruknya suatu sistem perencanaan hanya dapat di-*judge* melalui respon hasilnya atau kinerjanya dalam jangka waktu tertentu pelaksanaannya, melalui suatu sistem evaluasi yang komprehensif dan menyeluruh dengan menggunakan indikator yang kongkret dengan metode yang tidak rumit melainkan harus relatif sederhana dalam pengerjaannya. Untuk memberi tantangan lebih lanjut kepada para pembaca dalam proses *inquiring* suatu metode evaluasi seperti itu, pada bagian *ke Empat* ini kami sajikan topik tentang *Konsep Kesehatan Hutan*, yang merupakan suatu hibrid yang relatif baru dari cabang manajemen SDH.

Mengingat masih relatif baru, maka kosep Kesehatan Hutan masih merupakan ladang yang belum banyak diolah untuk dijadikan *tool* dalam evaluasi terhadap suatu praktek manajemen hutan. Secara ringkas dapat diungkapkan bahwa kesehatan ekosistem hutan adalah kelenturan (*resiliency*) suatu ekosistem hutan terhadap adanya guncangan ekologis (*ecological shocks*) baik yang disebabkan oleh faktor alami (seperti agin, gempa bumi, *pest disease* dll) maupun oleh faktor antropogenik (seperti pembabatan hutan, *accelerated erosion*, kelongsoran, banjir dll) seperti tersebut di atas. Dalam konteks ini ekosistem hutan yang sehat adalah hutan yang masih tetap mampu memberikan manfaat ekonomi maupun manfaat ekologis tanpa mengakibatkan merosotnya fungsi hutan secara nyata sebagai *suplier* barang dan jasa ketika mengalami gencangan ekologis sampai terjadi *self recovery* menuju kesetimbangan ekosistem yang mantap kembali. Jika manfaat ekonomi dan manfaat ekologis tetap dapat dipenuhi, maka dengan sendirinya manfaat sosial SDH juga demikian. Argumentasi ini sesuai dengan pemikiran Osoiano (2016) tersebut di atas bahwa ekonomi dan ekologi adalah sisi mata uang yang sama. Konsep dan audit kesehatan hutan ini haruslah menjadi prasyarat terpenting dalam mengembangkan SFM yang sejatinya.

Bila demikian postulat yang harus ditegakkan dalam konsep kesehatan hutan, maka dewasa ini di Indonesia umumnya dan di Provinsi Lampung khususnya, tidak banyak dijumpai ekosistem hutan yang sehat. Dengan kata lain banyak sekali suatupraktek pengelolaan hutan yang mempunyai

indikator keberlanjutan yang sangat lemah. Seperti telah diungkap di atas, adanya fenomena gagal panen akibat serangan hama penyakit pada tanaman budi daya, banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau, erosi yang jauh melampaui ambang dan sedimentasi (pada waduk; bendungan; muara-muara sungai dan badan-badan air lainnya), kebakaran hutan, eskalasi konflik manusia dengan satwa liar serta merebaknya berbagai penyakit baru pada manusia dan ternak adalah sederetan fenomena yang menggambarkan makin merosotnya kesehatan ekosistem hutan kita.

Kemerosotan tersebut sangat ekskalatif dalam dua dasawarsa terakhir yaitu sejak desentralisasi tata pemerintah berlangsung (Bakri, 2012). Tidak bijaksana jika kita terburu-buru menyalahkan kesepakatan politik nasional tentang desentralisasi itu. Karena fenomena kemerosotan tersebut merupakan andil dari banyak pihak. Sebagaimana diungkapkan oleh Atkinson (1997) tersebut di atas bahwa karakter individu manusia umumnya *selfish* dan *myopic*, tidak mampu menerawang ke dimensi waktu yang jauh kedepan. Dengan begitu maka banyak para *policy maker* yang mengambil jalan pintas untuk segera memperoleh manfaat ekonomi SDH secara cepat tanpa menyadari bahwa kapasitas teknokratik dan Ipteks yang dikuasai kini belum cukup memadai untuk melakukan substitusi teknologi terhadap degradasi komponen ekosistem sebagai dampak perilaku eksploitatif tersebut. Ambisi seperti itu juga dipercepat oleh mental para *forest planner* yang kurang profesional, hanya menjadi pembenar bagi para *client*-nya yaitu para *policy maker*.

Keadaan ini makin akut yang melahirkan suatu fenomena tragedi barang publik (*the tragedy of the common*) seperti diungkapkan Hardin (1968) maupun Crowe (2003). Fenomena ini terjadi pada esensinya juga karena lemahnya berbagai institusi yang ada di dalam masyarakat. Apalagi dengan institusi pasar, yang karakteristiknya sangat begitu otonom, yang sangat dikendalikan oleh segelintir orang (*baca: kapitalis*) sehingga sering terjadi *market buyers* yang bermuara pada perilaku eksploitatif masyarakat marjinal terhadap ekosistem hutan sampai ke kawasan-kawasan konservasi yang ketat. Bahkan kerusakan lingkungan telah dipolitisir (*politicking*) oleh untuk kepentingan beberapa aktor melalui berbagai propaganda sampai ke tingkat global. Untuk memfasilitasi para pembaca dalam mengurai kekusutan berbagai persoalan tentang *moral hazard*, *market hegemonic*, eksploitasi sumberdaya, degradasi ekosistem, serta peran aktor-aktornya

maka pada bagian *ke Lima* ini kami sajikan ke bahan diskusi tentang *Ekologi Politik*.

Diharapkan setelah mencermati topik ini akan muncul semacam stimulasi pada diri para pembaca untuk memberikan kontribusi pemikiran tentang bagaimana strategi untuk memperjuangkan keadilan sosial ekonomi dalam pengelolaan ekosistem hutan yang menjadi kristal yang esensial dalam perjuangan ekologi politik. Lebih lanjut diharapkan juga dapat muncul berbagai stimuli pemikiran tentang bagaimana merancang berbagai strategi pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam meraih keadilan sosial tersebut melalui gerakan masa yang masif. Karena itu pada puncaknya kami sajikan topik *ke Enam* yaitu tentang Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Konservasi untuk merancang SFM.

Dengan mengambil ceruk pembahasan tentang kawasan hutan konservasi diharapkan para pembaca buku dapat memperoleh stimulasi pemikiran tentang strategi untuk memperjuangkan keadilan sosial mulai dari masyarakat yang paling marginal, yang terpaksa harus terdesak ke kawasan yang suboptimal seperti di wilayah penyangga taman nasional, taman hutan raya, atau pun hutan lindung. Masyarakat yang banyak menggantungkan kehidupannya di kawasan-kawasan paling fragil dari sisi resiko akan lenyap plasma nutfah ini sudah selayaknya untuk diposisikan paling atas urgensinya dalam upaya mencari perumusan strategi untuk memperjuangkan keadilan sosial ekonomi mereka. Setelah itu, pemberdayaan masyarakat adalah tahapan urgensi berikutnya agar kemudian sadar akan hak-haknya dan secara sukarela berpartisipasi merasakan pentingnya mempertahankan kelestarian ekosistem tempat mereka melangsungkan perikehidupannya. Keberhasilan dalam menggerakkan partisipasi secara masif masyarakat di zona penyangga dari kawasan konservasi yang ketat seperti ini dapat dijadikan model bagi kawasan hutan lindung secara relative lebih mudah apalagi pada kawasan-kawasan hutan produksi. Namun bila belum berhasil maka ancaman akan lenyapnya ekosistem hutan beserta *non use values* atau pun *bequest values* yang terkandung di dalamnya akan terus membayangi kita. Dengan kata lain, bahwa praktek SFM ke depan akan terus dibayangi resiko yang besar tentang kiamat Malthus maupun lenyapnya ekosistem di bumi seperti yang dipostulatkan sebagai *Gaia Hypothesis* oleh kaum *Deep Ecologists* (lihat Kerry *et. al.*, 1994).

Dengan demikian setelah merampungkan semua topik yang disajikan dalam buku ini maka diharapkan para pembaca akan terprovokasi untuk berkontribusi dalam membangun arsitektur pemikiran tentang konsep SFM yang paling ideal. Selanjutnya untuk turut berkontribusi dalam merancang pelaksanaan SFM di Indonesia atau pun di belahan dunia manapun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atkinson, R. L. 1997. *Introduction to Psychology*. Terjemahan. Ed.8<sup>th</sup>. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Bakri, S. 2012. Fungsi intrinsik hutan dan faktor endogenik pertumbuhan ekonomi sebagai determinan pembangunan wilayah Provinsi Lampung. *Disertasi*. SPS. IPB Bogor.
- DFID. 1999. Sustainable livelihoods guidance sheets. Department for International Development, London.
- Crowe, B. L. 2003. The tragedy of the commons. *Science* 166:1103-1107.
- Gerrow, G. 1992. *Psychology: An Introduction*. John Wiley & Sons. New York.
- Hardin, G. 1968. The tragedy of the commons. *Science* 162:1243-1248.
- Kerry, T., D. Pearce, dan E. Rubinfeld. 1994. *Economics of Natural Resource*. Simon & Shuster. Int. Group.
- Osoiano, D. 2016. It's all about economics –*The urban ecology in T.S. Eliot's the waste land*. *Ovidius University Annals, Economic Sciences Series, Vol. 16* (1):218-222.







KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id

[www.lppm.unila.ac.id](http://www.lppm.unila.ac.id)

SURAT KETERANGAN JENIS BUKU

Nomor : 2143/UN26.21/PN/2023  
Lampiran : 1 (Satu) Buku

Berdasarkan hasil review atas karya:

Nama : Christine Wulandari, Indra Gumay Febryano, Rahmat Safe'i, Samsul Bakri, Slamet Budi Yuwono

ISBN : 978-602-6912-37-4

Penerbit : Plantaxia

Tahun Terbit : 2016

Unit Kerja : Fakultas Pertanian

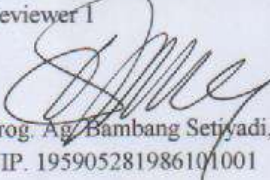
Dengan ini kami sampaikan hasil review dalam tabel berikut:

No	Judul	Keterangan				
		Referensi	Monograf	Buku Penelitian lain: termasuk Book Chapter	Buku Ajar	Buku Lain
1	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan : Provokasi Pemikiran Arsitektur, Konsep, dan Strategi			a. Buku Hasil Penelitian b. Book Chapter		

Demikian kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 11 April 2023

Reviewer 1

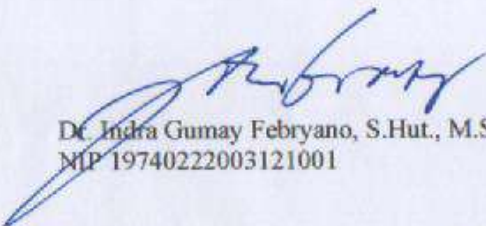


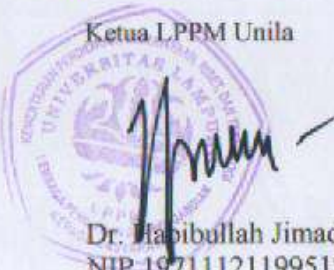
  
Prog. Ag. Bambang Setiyadi, Ph.D.  
NIP. 195905281986101001


Reviewer 2,

  
Prof. Dr. Ir. Cipta Ginting, M.Sc.  
NIP. 196012011984031003

Menyetujui,  
Ketua LPPM,

  
Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si.  
NIP. 197112119951210001

UNIVERSITAS LAMPUNG	
NO. INVEN	12-4-2023
JENIS	30/B/B/IN/FP/2023
Bookchapter	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
Judul Buku	: <b>Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Provokasi Pemikiran Arsitektur, Konsep, dan Strategi</b>
Penulis	: Christine Wulandari, Indra Gumay Febryano, Rahmat Safe'i, <b>Samsul Bakri</b> , Slamet Budi Yuwono
Jurusan	: Kehutanan
Fakultas	: Pertanian
ISBN	: 978-602-6912-37-4
Jumlah Halaman	: 127
Cetakan ke	: Satu (Pertama)
Penerbit/Tempat Tahun	: Plantaxia/Jogjakarta : 2016
Mengetahui:	Bandar Lampung, 29 Maret 2023
Ketua Jurusan Kehutanan	Penulis Anggota
	
Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si. NIP 19740222003121001	Dr. Ir. Samsul Bakri, 2022 NIP 196105051987032001
Menyetujui:	
Wakil Dekan	Ketua LPPM Unila
	
Prof. Dr. Ir. Barnomo, M.S. NIP 196406131987031002	Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si. NIP 197111211995121001

 plantaxia

# Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

PROVOKASI ARSITEKTUR, PEMIKIRAN, KONSEP DAN STRATEGI



**Christine Wulandari - Hari Kaskoyo - Indra Gumay Febryano  
Rahmat Safe'i - Samsul Bakri - Slamet Budi Yuwono**

# **Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**

**PROVOKASI ARSITEKTUR, PEMIKIRAN, KONSEP DAN STRATEGI**

# **Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**

**PROVOKASI ARSITEKTUR, PEMIKIRAN, KONSEP DAN STRATEGI**

**Christine Wulandari - Hari Kaskoyo - Indra Gumay Febryano  
Rahmat Safe'i - Samsul Bakri - Slamet Budi Yuwono**

 **plantaxia**

**Pengelolaan Hutan Berkelanjutan; Provokasi Arsitektur Pemikiran, Konsep dan Strategi**

*oleh Christine Wulandari; Hari Kaskoyo; Indra Gumay Febryano; Rahmat Safe'i; Samsul Bakri; Slamet Budi Yuwono*

*Editors: Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuw, M.Si; Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc; Ir. Warsono, Ph.D*

Hak Cipta © 2016 pada penulis



Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283

Telp: 0274-889398; 0274-882262; Fax: 0274-889057;

E-mail: [info@plantaxia.com](mailto:info@plantaxia.com); Web: [www.plantaxia.com](http://www.plantaxia.com)

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Tajuk Entri Utama: Judul

Pengelolaan Hutan Berkelanjutan; Provokasi Arsitektur Pemikiran, Konsep dan Strategi/Wulandari, Christine

- Edisi Pertama. Cet. Ke-1. - Yogyakarta: Plantaxia, 2016  
xvi + 118 hlm.; 25 cm

Bibliografi.: 11; 27; 49-53; 66-67; 77-80; 92-93; 112-117

ISBN : 978-602-6912-37-4

E-ISBN : 978-602-6912-38-1

1. Ekologi - Ekologi Hutan

I. Kaskoyo, Hari

II. Febryano, Indra Gumay

III. Safe'i, Rahmat

IV. Bakri, Samsul

V. Yuwono, Slamet Budi

VI. Judul

577.3

Semua informasi tentang buku ini, silahkan scan QR Code di cover belakang buku ini

---

# KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr.wb.*

Pembangunan sektor kehutanan di Indonesia telah memasuki babak baru sejak berlangsungnya reformasi dan desentralisasi tata pemerintahan, terutama sejak diberlakukannya Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti menjadi Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sekalipun sudah berlangsung hampir dua dasawarsa, namun episode perubahan tatanan kelembagaan nasional tersebut dirasa belum bisa sepenuhnya mengendalikan tata kelola pembangunan kehutanan yang berkesinambungan sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan itu sendiri. Bahkan untuk beberapa wilayah telah menampakkan gejala kemerosotan kualitas lingkungan hidup termasuk kualitas maupun fungsi hutan. Kondisi ini nampak setidaknya ketika periode ulang musim ekstrim berlangsung. Salah satunya adalah ketika La Ninna muncul maka terjadi kenaikan permukaan air sehingga akibatkan banjir, longsor, erosi, sedimentasi juga akibatkan adanya pendangkalan danau, waduk, maupun bendungan. Sebaliknya ketika El Ninno, dalam waktu singkat terjadi kekeringan, penyusutan badan-badan air, pasokan PLTA, kahat air bersih di kawasan urban, bahkan kebakaran hutan terjadi pada berbagai wilayah di tanah air tercinta.

Berbagai fenomena yang berdampak negatif terhadap aspek sosial, ekonomi dan ekologi itu telah menggugah para peneliti dan para praktisi di



sektor kehutanan untuk memikirkan peneguhan kembali pengejawatahan konsep dan reorientasi strategi pembangunan sumberdaya hutan dalam bingkai otonomi daerah yang tetap selaras dengan kesepakatan di KTT Bumi yang pertama di Rio de Janeiro 1992. Berkaitan dengan maksud ini saya selaku akademisi atau pun selaku Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menyambut gembira upaya sejawat akademisi kehutanan khususnya yang bernaung di Universitas Lampung (Unila), yaitu Dr. Christine Wulandari dkk. dalam menyumbangkan buah fikirannya berupa konsep-konsep pengelolaan hutan berkelanjutan yang ditinjau dari berbagai aspek dan telah tersusun dalam 7 bab buku ini. Lebih jauh saya berharap disusul oleh sejawat lainnya baik dari kalangan akademisi, praktisi ataupun dari stake holder kehutanan lainnya. Dengan maraknya buah fikiran semacam yang tertuang dalam buku ini maka upaya-upaya berbagai pihak yang merupakan stakeholder sektor kehutanan akan menjadi pilar penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi hutan sekaligus menyejahterakan rakyat dan dapat diwujudkan dalam waktu yang relatif singkat. Akhir kata semoga buku ini banyak membawa manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

*Wassalamualaikum wr. wb.,*

Jakarta 29 September 2016

Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.

---

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR FOTO	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 PILIHAN IDEOLOGI LINGKUNGAN DALAM PRAKSIS MANAJEMEN SUBERDAYA HUTAN BERKESINAMBUNGAN	13
2.1 Pendahuluan	13
2.2 Pemahaman terhadap Konsep Ideologi Lingkungan	14
2.3 Klasifikasi Ideologi Lingkungan dalam Pemanfaatan SDA	14
2.4 Ideologi Lingkungan sebagai Landasan Kebijakan Publik dalam SMF	19
2.5 Simpulan dan Rekomendasi	26
Daftar Pustaka	27
BAB 3 PENERAPAN SUSTAINABLE LIVELIHOOD FRAMEWORK DALAM MENGANALISIS PENGELOLAAN HUTAN	29
3.1 Pendahuluan	29
3.2 Pengelolaan Hutan di Indonesia	31
3.3 Pengertian <i>Livelihood</i> dan <i>Sustainable Livelihood</i>	34

3.4	<i>Sustainable Livelihood Framework</i>	36
3.5	Aset-aset Penghidupan	37
3.6	Konteks kerentanan	40
3.7	Perubahan, struktur dan proses	40
3.8	Strategi-strategi/kegiatan-kegiatan <i>livelihood</i> dan hasil	41
3.9	<i>Sustainable livelihood framework</i> dalam pengelolaan hutan di Indonesia	42
3.10	Kesimpulan dan rekomendasi	48
	Daftar Pustaka	49
<b>BAB 4</b>	<b>PERTIMBANGAN ASPEK HIDROLOGI, LAHAN DAN IKLIM DALAM PENGELOLAAN DAS (ZONASI AGRO EKOLOGI DALAM PENGGUNAAN LAHAN)</b>	<b>55</b>
4.1	Pendahuluan	55
4.2	Kebijakan Pengelolaan DAS yang Berkaitan dengan Penggunaan Lahan	58
4.3	Pertimbangan Teknis Penggunaan Lahan yang Rasional dalam Pengelolaan DAS	62
4.4	Penutup	66
	Daftar Pustaka	66
<b>BAB 5</b>	<b>KESEHATAN HUTAN: PENTINGNYA KESEHATAN EKOSISTEM HUTAN DALAM MEWUJUDKAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI</b>	<b>69</b>
5.1	Pendahuluan	69
5.2	Konsep Kesehatan Ekosistem Hutan	71
5.3	Penyebab Masih Kurang Seriusnya Perhatian Terhadap Kondisi Kesehatan Ekosistem Hutan	73
5.4	Pemantauan dan Penilaian Kesehatan Ekosistem Hutan	74
5.5	Simpulan Dan Rekomendasi	77
	Daftar Pustaka	77
<b>BAB 6</b>	<b>EKOLOGI POLITIK PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM</b>	<b>81</b>
6.1	Pendahuluan	81
6.2	Definisi Ekologi Politik	82

6.3	Dimensi Politisasi Lingkungan	85
6.4	Pendekatan dalam Ekologi Politik	86
6.5	Relasi Kekuasaan antar Aktor	89
6.6.	Penutup	92
	Daftar Pustaka	92
<b>BAB 7</b>	<b>PENTINGNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI</b>	<b>95</b>
7.1	Pendahuluan	95
7.2	Mengapa Perlu Ada Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi	97
7.3	Beberapa Kebijakan Yang Relevan Dengan Peran Serta Masyarakat Di Kawasan Konservasi	101
7.5	Manfaat Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi	103
7.6	Contoh Di Lapangan Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman, Bandar Lampung	103
7.7	Kesimpulan Dan Rekomendasi	111
	Daftar Pustaka	112
	Daftar Peraturan Perundangan	116



---

# DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3.1</b>	Sustainable Livelihood Framework (Kerangka kerja Penghidupan yang berkelanjutan) oleh DFID.	37
<b>Gambar 3.2</b>	Kerangka kerja Penghidupan yang berkelanjutan untuk menganalisis pengelolaan hutan lindung (modifikasi dari Kaskoyo, H, 2015).	43
<b>Gambar 7.1</b>	Peta situasi Tahura WAR terhadap daerah sekitar	107



---

## DAFTAR FOTO

- Foto 3.1** Tanaman Kopi yang Dibudidayakan Secara Agroforestry di Zona Budidaya di Hutan Lindung Pada Program Hutan Kemasyarakatan 44
- Foto 3.2** Tanaman Campuran di Zona Budidaya Pada Program Hutan Kemasyarakatan di Hutan Lindung. 45
- Foto 3.3** Satwa Liar, Siamang, yang Berada di Zona Perlindungan di Hutan Lindung Pada Program Hutan Kemasyarakatan. 46
- Foto 3.4** Sungai Kecil yang Sumber Mata Airnya Berasal Dari Zona Perlindungan, Digunakan Untuk Sumber Tenaga Mikrohidro. 46
- Foto 3.5** Zona Perlindungan yang Dibuka Oleh Masyarakat Untuk Budidaya Tanaman Pada Salah Satu Lokasi Program Hutan Kemasyarakatan di Hutan Lindung. 47
- Foto 3.6** Getah Karet Dan Foto 3.7. Biji Kopi Sebagai Hasil Utama Pendapatan Masyarakat Pada Salah Satu Program Hutan Kemasyarakatan di Hutan Lindung. 47
- Foto 7.1** Pelantikan Kelompok Sadar Wisata Gunung Betung Oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandarlampung (Foto Oleh Christine Wulandari, 2015) 105
- Foto 7.2** Pembangunan 3 Buah Gazebo di Lokasi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Gunung Betung (Foto Oleh Christine Wulandari, 2016) 106



- Foto 7.3** Pembangunan Pondok Pertemuan di Lokasi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Gunung Betung (Foto Oleh Christine Wulandari, 2016) 108
- Foto 7.4** Pertemuan Pokdarwis dengan Tim Universitas Lampung dan Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandarlampung Beserta Jajarannya Membahas Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Gunung Betung (Foto Oleh Christine Wulandari, 2016) 109

-oo0oo-

---

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	Pilihan Ideologi Lingkungan dalam Pemanfaatan SDA yang telah Berkembang di Kalangan Kaum Teknokratik dan Para Penentu Kebijakan di Berbagai Belahan Dunia	17
<b>Tabel 4.1</b>	Alternatif Pemecahan Masalah dengan Pendekatan Ekosistem DAS.	64
<b>Tabel 6.1</b>	Tesis Ekologi Politik	84
<b>Tabel 6.2</b>	Dimensi Politisasi Lingkungan	85
<b>Tabel 6.3</b>	Konsep dan Proses dalam Ekologi Politik	88

